

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu pendekatan utama dalam peningkatan cakupan layanan kesehatan yang merata yaitu dengan pembiayaan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan yang bersifat wajib berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN. SJSN merupakan program pemerintah dengan tujuan menjamin perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Andrika et al., 2023).

SJSN memastikan adanya jaminan sosial yang wajib dimiliki bagi semua warga Indonesia yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah dilaksanakan sejak 1 Januari 2014. BPJS mewajibkan seluruh penduduk Indonesia, termasuk orang asing yang telah bekerja di Indonesia selama lebih dari 6 bulan dan telah membayar iuran, untuk menjadi peserta jaminan kesehatan (Dewi et al., 2023).

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yaitu program jaminan sosial yang menjamin setiap masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan serta memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diselenggarakan nasional secara bergotong royong wajib bagi seluruh penduduk Indonesia melalui pembayaran secara mandiri atau iuran dibayarkan pemerintah kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Ramdhani et al., 2020).

Kepesertaan BPJS Kesehatan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dimana pesertanya merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu yang di daftarkan oleh pemerintah dan iurannya dibayarkan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Undang-Undang yang telah ditetapkan. Sedangkan Peserta yang Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) yaitu peserta yang tidak termasuk dalam golongan fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas pekerja penerima upah dan anggota keluarganya (Ananda et al., 2022).

Golongan BPJS peserta Non PBI yang disebut sebagai BPJS Kesehatan Mandiri, Peserta Non- PBI dibagi menjadi 3 (tiga) yakni Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPUBU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP) Peserta mandiri atau pada pekerja formal dalam melakukan pembayaran iuran JKN dikelola oleh tempat mereka bekerja yang dengan cara dipotong secara langsung dari upah atau gaji mereka. Sedangkan pada sektor informal harus mengelola pembayaran iuran jaminan kesehatannya sendiri (Adani, 2019).

Berdasarkan data BPJS Kesehatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 jumlah peserta yang terdaftar dalam program JKN sebanyak 95,7% jumlah penduduk Indonesia. yang dikelola oleh BPJS Kesehatan berjumlah 267.311.566 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 96.766.786 peserta PBI sedangkan 87.678.193 peserta Non PBI. Dengan demikian, jumlah peserta aktif sekitar 207,56 juta, sedangkan yang tidak aktif berkisar 55,18 juta peserta (BPJS Kesehatan, 2023).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 yang memiliki asuransi BPJS Kesehatan yaitu sebanyak 60,62% dari jumlah penduduk 15.386.640 jiwa. Penggunaan BPJS Kesehatan yang mana terbagi menjadi 2

golongan, yaitu PBI dan Non PBI. Jumlah peserta PBI sebanyak 35,00% dan peserta Non PBI sebanyak 25,62% (Badan Pusat Statistik, 2023).

Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki jumlah penduduk sebanyak 320.324. Penduduk tersebut yang memiliki asuransi BPJS Kesehatan yaitu sebesar 52,13% peserta diantaranya jumlah peserta PBI sebanyak 28,08% sedangkan jumlah peserta Non PBI sebanyak 24,05% (Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2023).

Kecamatan Silangkitang masih termasuk kecamatan yang belum memiliki cakupan kepesertaan JKN sesuai dengan standart nasional, dimana pada tahun 2023 tercatat yang masih memiliki asuransi BPJS Kesehatan yaitu sebanyak 43% peserta dari jumlah penduduk sebanyak 31.08, dimana jumlah peserta PBI yaitu 24% sedangkan jumlah Non PBI sebanyak 19% (Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2023). Berdasarkan data dari Puskesmas Aek Goti, jumlah peserta JKN mandiri di Desa Binanga Dua sebanyak 728 orang (12,1%), sedangkan jumlah peserta PBI sebanyak 1.119 orang (18,6%).

Rendahnya pemanfaatan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dapat diteliti dengan pendekatan teori Anderson (1974), mengemukakan bahwa faktor yang mendorong seseorang memanfaatkan pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh 3 hal yaitu: Predisposisi, Enabling, dan Need. Predisposisi yaitu fakta bahwa setiap individu menggunakan pelayanan kesehatan, seperti Karakteristik demografi Struktur sosial, dan Manfaat kesehatan. Enabling yaitu kondisi yang mendukung seseorang memanfaatkan pelayanan kesehatan seperti kondisi ekonomi atau dukungan keluarga dan petugas kesehatan, dan Need yang menjelaskan adanya

faktor kebutuhan baik langsung maupun tidak langsung yang dirasakan oleh individu untuk menggunakan pelayanan kesehatan.

Pada penelitian Rahmayanti dan Ariasih (2021), berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditemukan hasil bahwa peserta JKN mengeluhkan sikap tenaga kesehatan yang kurang tanggap dan sigap serta kurang teliti dalam memberikan pelayanan kesehatan. Persepsi yang baik terhadap suatu pelayanan akan membuat masyarakat tertarik untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan itu sendiri. maka dari itu, perlu adanya membangun komunikasi yang baik, itu sangat berpengaruh terhadap penilaian masyarakat itu sendiri (Rahmayanti & Rr. Arum Ariasih, 2021).

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan (Pakpahan dkk, 2019) berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa mayoritas peserta yang tidak patuh membayar iuran JKN karena tidak memiliki sumber pendapatan tetap, sehingga sulit bagi mereka untuk menyisihkan sebagian pendapatan yang diperoleh untuk membayar iuran. Menurut Lawrence dalam (Notoatmodjo S,2010) pekerjaan merupakan faktor yang menentukan pendapatan yang nantinya akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan (Pakpahan, dkk, 2021). Mayoritas responden dalam penelitian ini bekerja sebagai wiraswasta atau pedagang dengan persentase 42%. Pada awal tahun 2020, Indonesia dilanda pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian lokal dan berkurangnya pendapatan untuk pekerjaan informal dan mandiri. Beberapa responden menyatakan bahwa pengaruh dari pandemi terhadap pendapatan membuat mereka tidak mampu membayar iuran sehingga menunggak.

Pada penelitian Wahyuni dkk di Sulawesi, pengaruh dukungan keluarga terhadap keikutsertaan anggota JKN. Untuk menjadi peserta JKN, masyarakat harus

terlebih dahulu berbicara dengan anggota keluarga lain tentang manfaat program dan menanyakan tentang prosedur untuk memenuhi persyaratan seperti mendapatkan fotokopi KTP mereka. Dukungan keluarga sangat penting karena sistem kekeluargaan di kelurahan peneki juga masih erat sehingga untuk memutuskan menjadi peserta harus dirundingkan terlebih dahulu. Sebagian masyarakat memilih untuk tidak menjadi peserta JKN karena keluarga kurang mengerti manfaat dan cara menjadi peserta JKN sehingga tidak mendukung untuk menjadi peserta JKN (Wahyuni, 2022).

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan pada beberapa masyarakat di Desa Binanga Dua tanggal 16 Februari 2024, masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta JKN mandiri ditemukan 7 dari 10 masyarakat mengakui bahwa mereka kurang memahami dengan baik aturan dari pelayanan serta pemanfaatan JKN ini, sehingga masyarakat yang menjadi peserta JKN kurang mendapatkan informasi mengenai pemanfaatan JKN sebagai pelayanan kesehatan.

Aksesibilitas menjadi salah satu hambatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan JKN dimana menurut pengakuan 7 dari 10 masyarakat yang ada di Desa Binanga Dua jarak tempuh yang mereka lalui memerlukan waktu kurang lebih 30 menit menuju ke pelayanan kesehatan, dengan kondisi jalan berlubang serta pasir yang tebal, apalagi kalau musim hujan akan membuat jalan licin dan banyak air yang tergenang di jalanan, akibat dari itu mereka tidak ingin mengunjungi fasilitas kesehatan dengan memanfaatkan kartu kepesertaan JKN. Selain itu sebagian masyarakat masih memiliki kepercayaan atau kecenderungan memilih pelayanan kesehatan alternatif atau tradisional dalam memeriksakan keluhan sakit yang dialaminya.

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dengan adanya penambahan variabel pengetahuan, dimana informasi mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan itu masih terbatas, sehingga perlu studi yang lebih mendalam terkait pemanfaatan JKN sebagai rekomendasi kebijakan pelayanan kesehatan. Selanjutnya variabel Pendidikan, masyarakat di Desa Binanga Dua, Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih rendah. Variabel Jarak tempuh di Desa Binanga Dua menjadi hambatan masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan karena jarak dari rumah ke fasilitas kesehatan cukup jauh dan akses untuk menuju fasilitas kesehatan juga mengalami kendala karena masih banyak jalan yang dipenuhi dengan lubang, jadi menyulitkan masyarakat untuk menuju kesana karena akan membutuhkan waktu yang lebih lama.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Maka penulis merasa tertarik untuk menggali lebih mendalam mengenai “Faktor Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional JKN Oleh Peserta Mandiri di Desa Binanga Dua, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

1.2 Rumusan masalah

Seluruh warga Indonesia wajib menjadi peserta JKN, tetapi banyak ditemukan bahwa masyarakat yang tidak memanfaatkan layanan kepesertaan JKN di fasilitas kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “faktor apa saja yang berhubungan dengan pemanfaatan JKN di Desa Binanga Dua, Kabupaten Labuhanbatu Selatan?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Faktor Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh peserta mandiri di Desa Binanga Dua, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui faktor pendidikan masyarakat dalam pemanfaatan JKN oleh peserta mandiri di Desa Binanga Dua, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Mengetahui faktor pekerjaan masyarakat dengan pemanfaatan JKN oleh peserta mandiri di Desa Binanga Dua, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
3. Mengetahui faktor kepercayaan masyarakat dalam pemanfaatan JKN oleh peserta mandiri di Desa Binanga Dua, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
4. Mengetahui faktor pengetahuan masyarakat dengan pemanfaatan JKN oleh peserta mandiri di Desa Binanga Dua, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Mengetahui faktor pendapatan masyarakat dalam pemanfaatan JKN oleh peserta mandiri di Desa Binanga Dua, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Mengetahui faktor sikap masyarakat dalam pemanfaatan JKN oleh peserta mandiri di Desa Binanga Dua, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

7. Mengetahui faktor aksesibilitas masyarakat dalam pemanfaatan JKN oleh peserta mandiri di Desa Binanga Dua, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
8. Mengetahui keluhan sakit terhadap pemanfaatan JKN oleh peserta mandiri di Desa Binanga Dua, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman secara langsung mengenai pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Desa Binanga Dua, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

1.4.2 Manfaat secara praktis

Manfaat penelitian ini sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya terutama pada bidang kesehatan serta penyelenggaraan jaminan kesehatan di masyarakat.

1.4.3 Bagi masyarakat pengguna BPJS Kesehatan

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat pengguna Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta memanfaatkan lebih baik sistem pelayanan kesehatan yang telah tersedia.